

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator penting pembangunan ekonomi. Akan tetapi untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup dengan 1 indikator saja, diperlukan indikator lain diantaranya mencakup aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Komponen dasar atau nilai inti keberhasilan pembangunan ekonomi antara lain kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self - esteem*) dan kebebasan (*freedom*), yang merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap masyarakat (Todaro, 2006:26) (Baeti, 2013)

Fungsi dasar dari kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah untuk menyediakan sebanyak mungkin kebutuhan dasar masyarakat, atas dasar itulah syarat penentu keberhasilan ekonomi adalah membaiknya kualitas kehidupan seluruh lapisan masyarakat (Charisma Kuriata Ginting, 2008). Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui indikator kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Yang sangat baik sebagai modal untuk menjalankan proses pembangunan. (Umiyati et al., 2017)

Salah satu indikatornya ialah Pendidikan, adanya tingkat pendidikan yang tinggi akan menghasilkan terciptanya tenaga kerja yang terdidik dan paham akan teknologi karena adanya pengetahuan dan keahlian, sehingga dalam produksi lebih akan lebih efisien. Indikator lainnya adalah Kesehatan, kemampuan pemerintah

dalam melindungi Kesehatan masyarakat dapat menghasilkan tenaga kerja yang sehat guna meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan kesehatan yang baik dapat memaksimalkan hasil produktivitas akan barang dan jasa dimana dapat meningkatkan perekonomian. Membaiknya perekonomian masyarakat dilihat dari pengeluaran perkapita yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang menjadi salah satu agenda SDGs (*Sustainable Development Goals*).

Pengentasan Angka Kemiskinan juga adalah salah satu indikator pertumbuhan ekonomi, program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menstimulus angka kemiskinan menjadi menurun sehingga daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok tercapai. Perekonomian berputar dikarenakan masyarakat membutuhkan barang dan jasa, membaiknya suatu perekonomian juga dapat menarik para pengusaha dalam meningkatkan berbagai produksi dimana membutuhkan tenaga kerja sehingga terciptanya lapangan usaha dan para investor tertarik menanamkan modalnya. Jika ini terus terjadi pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat yang dapat dilihat dari Produk domestik bruto (PDB). Peningkatan ini bermanfaat akan kebijakan pemerintah dalam menentukan alokasi dana untuk pendidikan 20% dan kesehatan 5% yang dilihat dari APBN/APBD. Anggaran digunakan untuk memberikan sarana dan prasarana fasilitas publik bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh layanan yang adil dan merata baik untuk pendidikan dan kesehatan.

Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan terjadinya peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan adanya heterogenitas

individu, disparitas geografi serta kondisi sosial masyarakat yang beragam sehingga menyebabkan tingkat pendapatan tidak lagi menjadi tolak ukur utama dalam menghitung tingkat keberhasilan pembangunan. Pendekatan pembangunan manusia tidak semata-mata menjadi sebuah tujuan, namun merupakan sebuah proses.

Perwakilan 193 negara anggota PBB memperbaharui sebuah agenda pembangunan global yang berjudul *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. yang memuat 17 tujuan dan terbagi ke dalam 169 target yaitu SDGs (*Sustainable Development Goals*) merupakan komitmen masyarakat internasional meneruskan Tujuan Pembangunan Millenium MDGs (*Millenium Development Goals*), untuk kehidupan manusia menjadi lebih baik (UN, 2015). SDGs merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi, serta dapat bersinergi dengan lingkungan.

The United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan pembangunan manusia sebagai sebagai suatu proses perluasan pilihan manusia dalam meningkatkan kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, penghasilan dan pekerjaan. Salah satu alat ukur atau indikator yaitu *Human Development Indeks* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merubah beberapa indikator dari IPM yang sudah tidak relevan untuk digunakan dalam perhitungan IPM, yaitu Angka

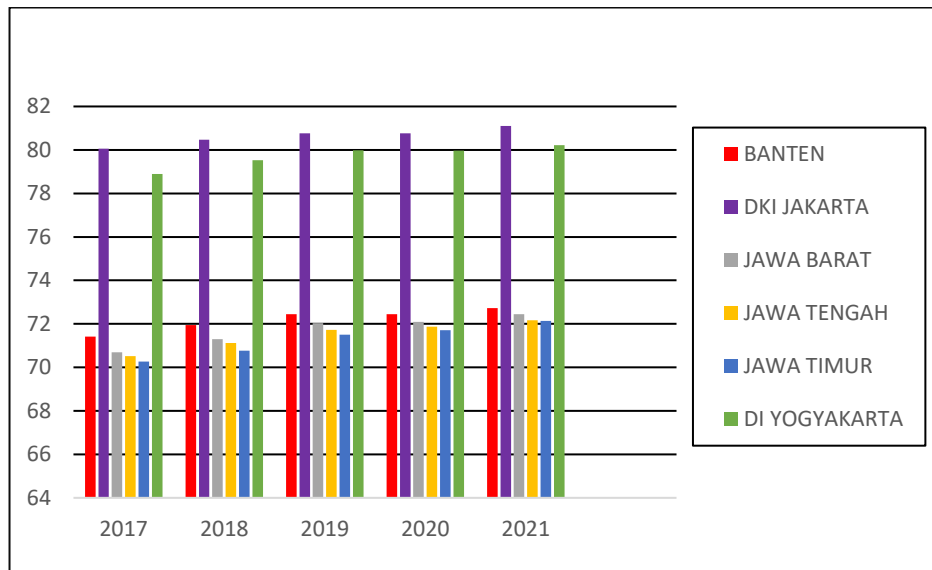
Melek Huruf yang diubah menjadi Angka Harapan Lama Sekolah, lalu Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang diubah menjadi Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Tabel 1.1 Peringkat 10 besar Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia, 2017-2021

Peringkat	Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	DKI Jakarta	80.06	80.47	80.76	80.77	81.11
2	DI Jogjakarta	78.89	79.53	79.99	79.97	80.22
3	Kalimantan Timur	75.12	75.83	76.61	76.24	76.88
4	Kep Riau	74.45	74.84	75.48	75.59	75.79
5	Bali	74.30	74.77	75.38	75.50	75.69
6	Riau	71.79	72.44	73.00	72.71	72.94
7	Sulawesi Utara	71.66	72.20	72.99	72.93	72.00
8	Banten	71.42	71.95	72.44	72.45	72.72
9	Sumatra Barat	71.24	71.73	72.39	72.38	72.65
10	Jawa Barat	70.69	71.30	72.03	72.09	72.45

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 1.1 Realisasi pembangunan Ekonomi di pulau Jawa merupakan sasaran prioritas karena berbagai kegiatan ekonomi, politik, sosial, budaya lebih terkonsentrasi di jawa dibandingkan di luar jawa. Sehingga aliran modal tenaga kerja lebih kuat di jawa namun, kemajuan di jawa belum tergambarkan dengan peningkatan IPM. Hanya beberapa provinsi yang memiliki IPM yang di atas rata-rata yaitu DKI jakarta dan DIY sementara banten dan jawa barat walaupun masuk kelompok 10 besar. Sedangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur belum masuk nominasi 10 Besar.



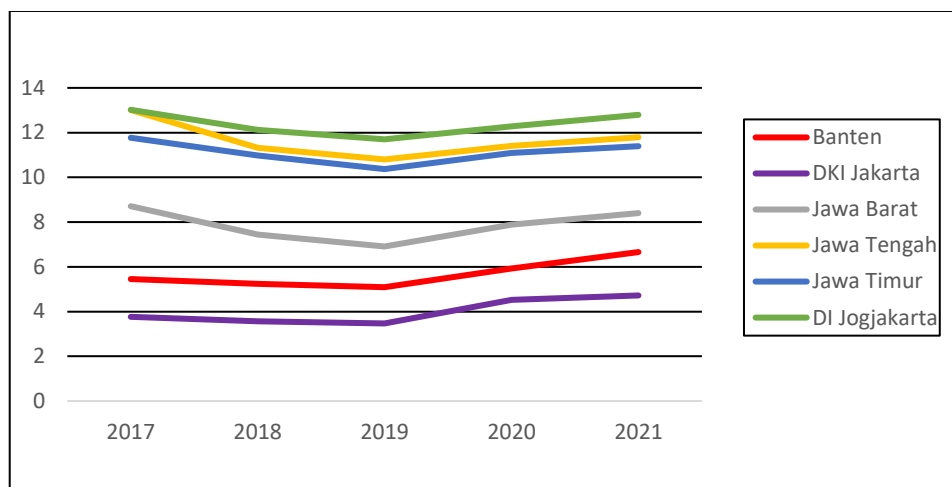
Gambar 1.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2017 – 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Gambar 1.1 Selama tahun 2017 hingga tahun 2021, setiap provinsi di Pulau Jawa mengalami peningkatan terhadap IPM setiap tahunnya. Peningkatan tertinggi ini ada pada tahun 2021. IPM tertinggi yaitu DKI Jakarta karena Jakarta merupakan ibu kota dimana pusatnya aktivitas kegiatan. Pusat pemerintahan perdagangan (dunia usaha), pendidikan dan kesehatan terjadi. Banyak masyarakat sudah sadar akan pentingnya kesehatan dan pendidikan dikarenakan mudahnya akses baik ke pelayanan kesehatan maupun pendidikan sehingga pemerintah dapat dengan mudah mengontrol komponen peningkatan IPM. Dan Yogyakarta sendiri dikenal dengan nama kota pelajar dimana banyak masyarakat di Indonesia menginginkan menempuh pendidikan di Jogja, salah satu Universitas Negeri yaitu UGM.

Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks

yang sebenarnya bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan pun terabaikan. Dimana menjadikan gap pembangunan manusia diantara keduanya pun menjadi besar dan pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tidak terealisasi dengan baik. (Mirza, 2012)



Gambar 1.2 Perkembangan Presentase Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2017 – 2021

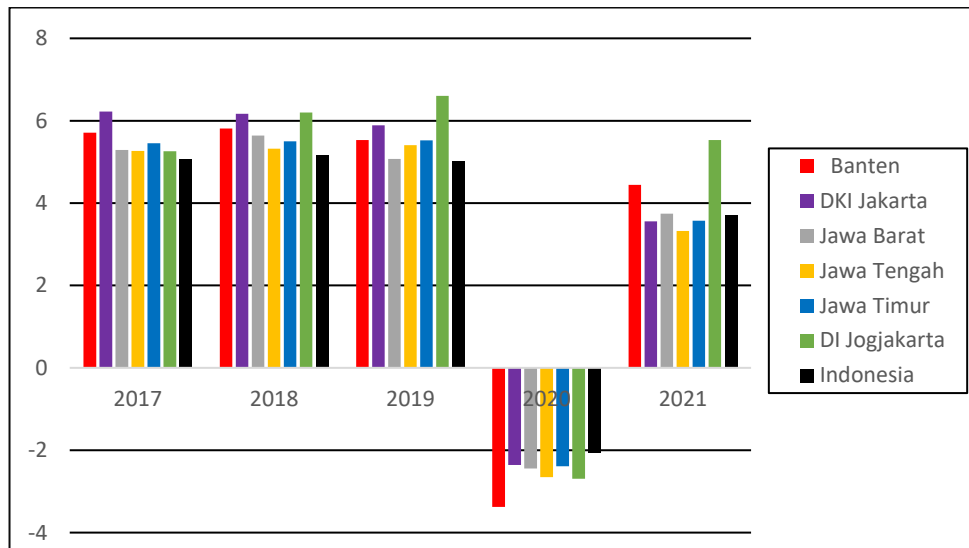
Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Gambar 1.2 Perkembangan persentase kemiskinan provinsi di Pulau Jawa 2017-2021 mengalami fluktuatif. Angka Kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Banyaknya lansia yang tidak produktif dan standar hidup layak yang rendah serta peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Upah karena terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang membuat aktivitas ekonomi berkurang dimana banyaknya mahasiswa perantauan kuliah secara online. Tahun 2021 masih tinggi karna efek dari ppkm pada tahun sebelumnya dan aktifitas ekonomi belum pulih total.

Terendah Provinsi DKI Jakarta, mudah dalam mengakses berbagai fasilitas publik sehingga meningkatkan komponen IPM. Sejalan dengan sektor lapangan kerja yang mendominasi di sektor industri yang membutuhkan tenaga kerja berpendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan IPM di kota tersebut dapat membantu pengentasan dalam hal kemiskinan. Dan berbagai bantuan pemerintah lebih mudah di jangkau di jakarta.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi ciri khas khusus dari DKI Jakarta. Banyaknya pengangguran disebabkan oleh terus bertambahnya penduduk yang melakukan urbanisasi ke DKI Jakarta setiap tahunnya yang mana selalu mengalami peningkatan. Akibatnya, jumlah penduduk DKI Jakarta terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, termasuk yang disebabkan oleh pertumbuhan alami. Sedangkan terbatasnya kesempatan kerja, dibanding dengan jumlah penduduknya.

Undang-Undang Dasar 1945 tujuan bangsa Indonesia diantaranya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pelaksanaan pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran utama bagi negara-negara sedang berkembang. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga dengan semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, maka kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. dimana dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Bruto (PDB). (Dewi et al., 2016)



Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2017-2021

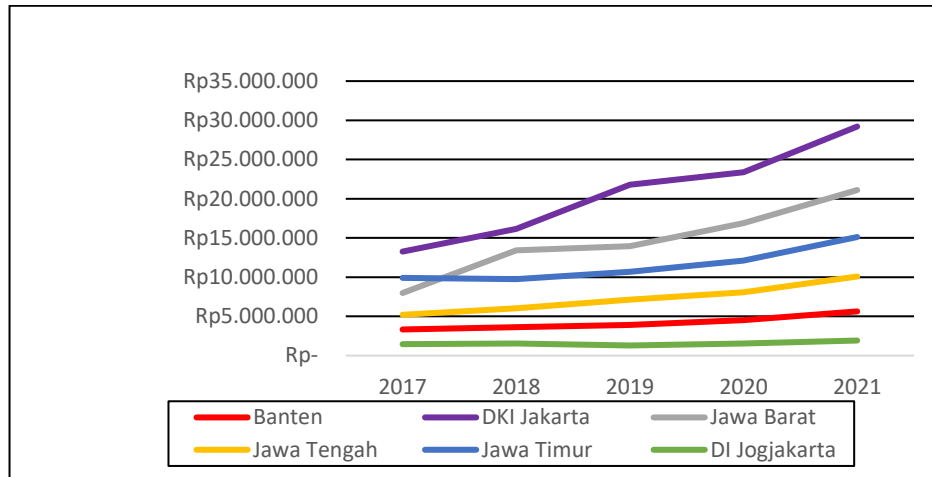
Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa 2017-2021 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 Pertumbuhan mengalami penurunan yang diakibatkan oleh Pandemi COVID-19. Berkurangnya aktivitas ekonomi dan aktivitas-aktivitas lain yang di rasakan hampir di seluruh belahan dunia bahkan terasa dampaknya sampai sekarang. Maka dari itu diperlukan kebijakan dari Pemerintah untuk menstabilkan kembali keadaan dalam upaya peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. pada tahun 2021 pertumbuhan tertinggi di yogyakarta diantara 6 provinsi yang lain.

Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting, diantara kesemua sektor publik saat ini yang menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam kaitannya yang tercermin dari indeks

pembangunan manusia adalah investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan.

(Mahar Amaini, 2018)

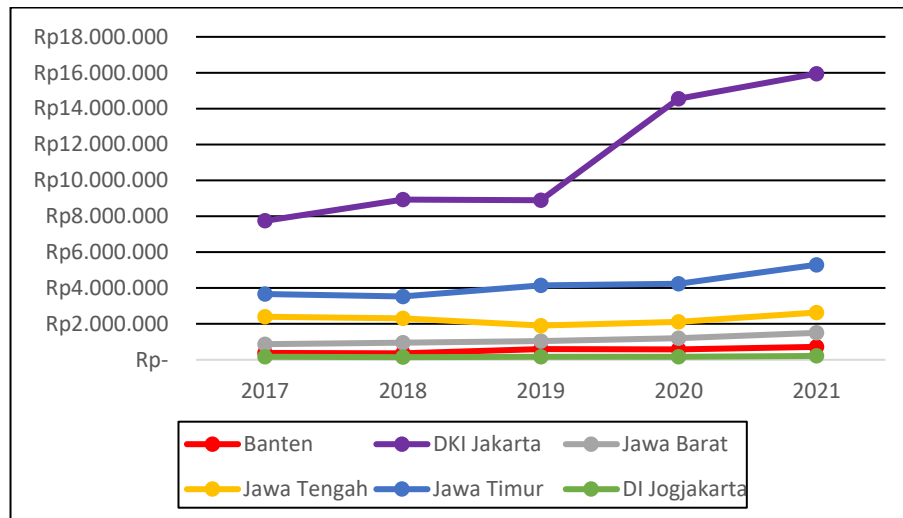


Gambar 1.4 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2017-2021 (milyar rupiah)

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.4 Pemerintah daerah Pulau Jawa mengalokasikan dana anggaran belanja untuk sektor pendidikan. Jakarta cukup besar dalam komponen belanja pembangunan daerah seperti yang digambarkan, dengan meningkatnya belanja pemerintah Jakarta dari tahun ke tahun kenyataannya perkembangan IPM Jakarta mengalami kenaikan walaupun kenaikannya tidaklah terlalu besar. Sedangkan jogja anggaran paling rendah diantara lain tetapi nilai ipm tertinggi nomer dua di indonesia.

Upaya pemerintah dalam mengalokasikan dana dengan berbagai kebijakan dan inovasi pun dilaksanakan, diantaranya peningkatan kualitas laboratorium dan perpustakaan, training berkala bagi tenaga pendidik untuk ketersediaan fasilitas pendidikan.



Gambar 1.5 Pengeluaran Pemerintah Sektor kesehatan Menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2017-2021 (miliar rupiah)

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.5 Pemerintah daerah Pulau Jawa mengalokasikan dana anggaran belanja untuk sektor kesehatan. Jakarta paling tinggi alokasi dana kesehatan dengan nilai ipm tertinggi di Indonesia, yang kedua Jawa Timur tetapi Jawa Timur belum masuk dalam kelompok IPM sepuluh peringkat besar Indonesia.

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan & fasilitas kesehatan secara mudah, merata dan murah. Seperti puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain. Mengadakan program pengadaan dan pengawasan obat dan makanan. Penyuluhan tentang kesehatan gizi dan kebersihan lingkungan. Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan.

Peningkatan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan di provinsi pulau jawa merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia. Investasi pada modal manusia diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap kinerja perekonomian yang salah

satunya dapat diamati dari aspek tingkat pendidikan, kesehatan dan tingkat kemiskinan. Investasi modal manusia ini yang mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia membutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran dalam mendorong peningkatan kualitas SDM. Menurut Mankiw (2008), pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. (Usmaliadanti, 2011)

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Pulau Jawa tahun 2011-2021”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia provinsi di pulau jawa tahun 2011-2021?
2. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia di provinsi pulau jawa tahun 2011-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis.

1. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia provinsi di pulau jawa tahun 2011-2021
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah secara bersama-sama terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi pulau jawa tahun 2011-2021

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pengembangan Ilmu

Untuk memberikan kontribusi ilmiah mengenai pentingnya pengaruh ekspor, nilai tukar dan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara terhadap cadangan devisa di Indonesia dan sebagai salah satu bahan informasi bagi penelitian selanjutnya.

2. Bagi Operasional Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan strategis terutama yang menyangkut cadangan devisa di Indonesia.

3. Bagi penulis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni.

